



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi serta rencana kerja yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu tahun 2022. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun semoga membawa manfaat positif bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan di tahun mendatang.

Paiman, 24 Februari 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



SYAFRIJONI, SH.M.Si
NIP. 19680904 199308 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Iktisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Kelembagaan	3
1.4.1. Struktur Organisasi	3
1.4.2 Kepegawaian	5
1.4.3 Sarana dan Prasarana.....	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Perencanaan Stategis Dinas Perhubungan	7
2.1.1 Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	7
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	8
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	9

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	11
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	12
3.3 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022	13
3.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya	15
3.3.2 Faktor-faktor yang menjadi masalah/ kendala dalam pencapaian target indikator kinerja	16
3.4 Akuntabilitas Keuangan	20
BAB IV. PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	38

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun yang menjadi tujuan pembangunan bidang perhubungan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan sebagaimana tersebut dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 2021 – 2026 adalah :

“Meningkatnya Keselamatan Transportasi”

dengan Indikator “ Rasio Konektifitas”. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi indikator Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan.
2. Meningkatkan Konektifitas dan Aksebilitas Antar Wilayah.
Indikator “Rasion Konektifitas”.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 3
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	2022		% capaian
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan	Tanpa Satuan	BB(76)	BB(76)*	100
2	Meningkatnya Konektifitas dan Aksebilitas Antar Wilayah	Rasio Konektifitas	Angka	57	58	101,75
Rata-rata Capaian Kinerja Misi III						100%

*Data : Hasil AKIP 2021

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh alokasi dana APBD sebesar **Rp. 15.909.146.641,-** (*Lima belas milyar Sembilan ratus Sembilan juta serratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*). Sasaran tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) program dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Dari hasil evaluasi dan analisis serapan anggaran **sangat baik** karena keberhasilan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun adalah sebesar **Rp. 15.452.261.049,-** (*Lima belas milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah*) atau 97,13%.

Painan, 24 Februari 2023
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PESIR SELATAN



SKAFRIONI, SH.M.Si
 NIP. 19680904 199308 1 001

1.1. Latar Belakang

Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perhubungan Pesisir Selatan sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Pesisir Selatan tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Tahun 2022, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perhubungan Pesisir Selatan pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Pesisir Selatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Perhubungan Pesisir Selatan tahun 2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Pesisir Selatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabuapten Pesisir Selatan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan . Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 berisi ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen Renstra yang dalam penyusunannya disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan.

1.4 Kelembagaan

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, Kepegawaian serta sarana dan prasarana.

1.4.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan membawahi 1 sekretariat, 3 bidang yakni:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Sekretaris adalah membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.

Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pembinaan di bidang lalu lintas kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan bidang lalu lintas, dan dibantu oleh :

- a) Kepala Seksi Lalu Lintas
- b) Kepala Seksi Angkutan
- c) Kepala Seksi Pengujian Sarana

3. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pembinaan di bidang Pengembangan dan Keselamatan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan bidang Pengembangan dan Keselamatan, dan dibantu oleh :

- a) Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
- b) Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan
- c) Kepala Seksi Keselamatan

4. Bidang Prasarana

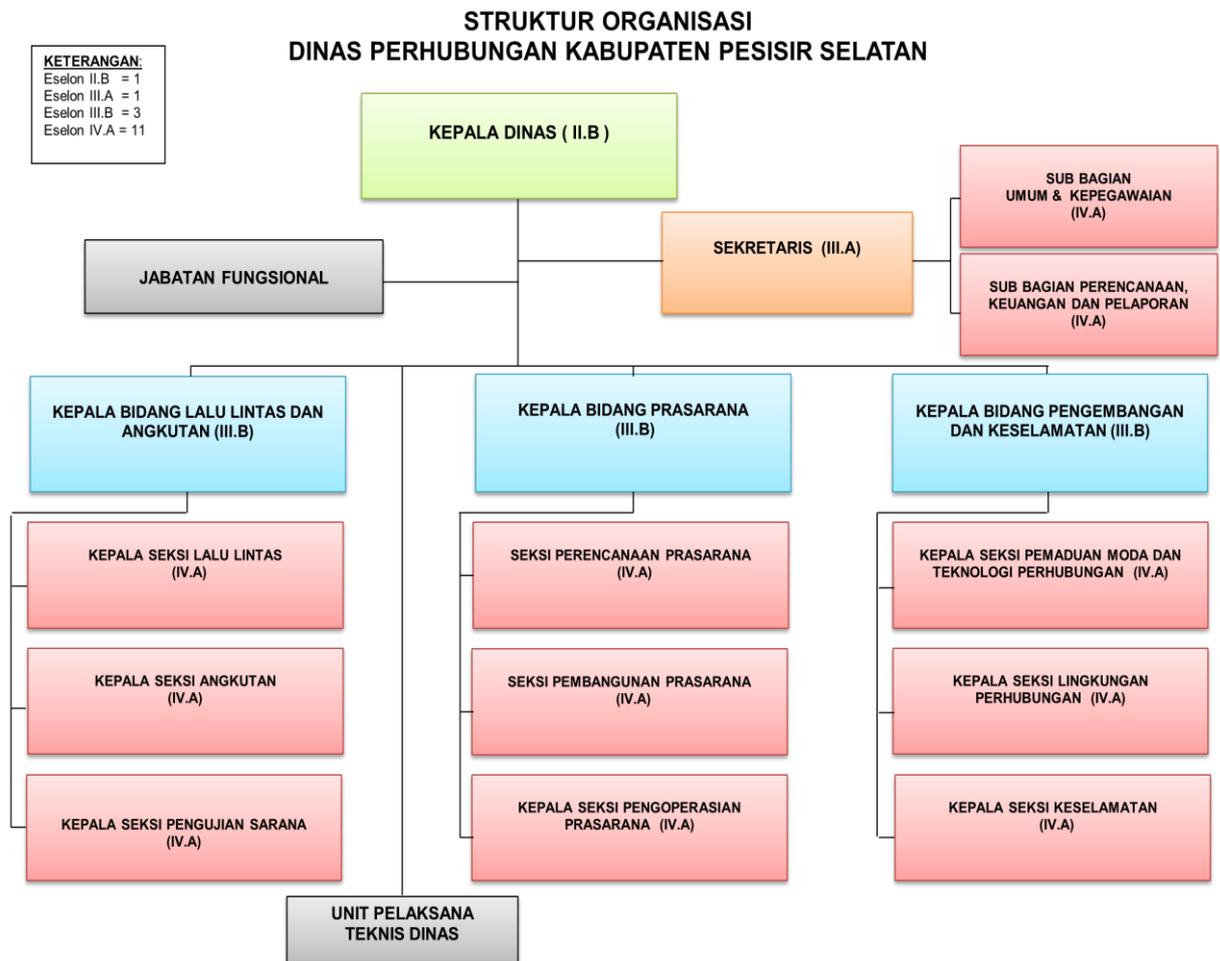
Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pembinaan di bidang Prasarana kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan bidang Prasarana, dan dibantu oleh :

yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh :

- a) Kepala Seksi Perencanaan Prasarana
- b) Kepala Seksi Pembangunan Prasarana
- c) Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana

5. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Susunan organisasi tersebut diatas apabila digambarkan dalam bentuk struktur organisasi akan tampak sebagai berikut :



1.4.2. Kepegawaian

Pada tahun 2022 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh 112 (seratus dua belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 40 orang dan Tenaga Non ASN (Honorar) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang.

1.4.3 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana pendukung tersebut antara lain berupa gedung kantor dan kendaraan dinas. Data kendaraan

dinas dan gedung kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan keadaan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel 1 dan tabel 3 berikut :

Tabel 1. 4
Sarana Prasarana Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Harga (Rp.)
1	Tanah	2	Bidang	394.467.844,-
2	Peralatan dan Mesin	1.441	Unit	10.494.778.645,-
3	Gedung dan Bangunan	35	Unit	3.263.972.996,-
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	85	Buah	14.945.020.480,-
5	Aset lainnya	2	Unit	244.812.000,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan 2022

Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, yang terdiri dari berbagai komponen yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan dalam RPJMD selama kurun waktu 2021-2026 secara berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, yang mengandung rumusan tugas, fungsi, sasaran strategis, yang meliputi kebijakan dan program yang realistis, dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Perencanaan strategis ini akan didukung oleh perencanaan kinerja dan penetapan kinerja setiap tahunnya.

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan, dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang Perhubungan.

Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Tugas Dinas Perhubungan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah berada pada **Misi III** yang berbunyi :

“Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah”

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No	M I S I YANG DIDUKUNG	TUJUAN	SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Meningkatnya Tata Kelola Organisasi</div> <div style="padding-top: 5px;">Meningkatnya Konektivitas dan Aksebilitas Antar Wilayah</div>

2.2 Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan bagian penting dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, yang menjadi komitmen bagi Kepala Daerah untuk mencapainya.

Sedangkan Penetapan Kinerja merupakan janji (kontrak) kinerja yang akan diwujudkan oleh Kepala Daerah sebagai penerima amanah, yang menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun tertentu. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah, yang diutamakan terhadap program utama yang menggambarkan keberadaan pemerintah daerah serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Melalui penetapan kinerja ini pemerintah daerah akan dapat memantau dan mengendalikan pencapaian kerjanya, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja, dan menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintah.

Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan	BB
2	Meningkatnya Konektifitas dan Aksebiltas Antar Wilayah	Rasio Konektifitas	57
		Inovasi Dinas Perhubungan	1

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran keberhasilan suatu target kinerja perangkat daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi	Satuan	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai LKJIP	Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap AKIP Dinas Perhubungan	Tanpa Satuan	BB(74)	BB(76)	BB(78)	A(82)	A(84)	A(86)	Bagian Sekretariat, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Kesematanan	Dinas Perhubungan
2	Meningkatnya Konektivitas dan Akseibilitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas	(IK1 x Bobot Angkutan Jalan)+ (IK2x Bobot Angkutan Sungai danau dan Penyebrangan	Angka	55	57	58	60	61	63	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Kesematanan	Dinas Perhubungan

Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun memberikan gambaran tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian atas pencapaian target sasaran tersebut akan dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja, dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan serta analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/ Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja yang dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat
Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Prediket
1	85-100	Sangat Baik
2	69-84	Baik
3	53-68	cukup
4	<53	Gagal

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil pengukuran capaian target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	Misi/ Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			Predikat	Kode
			Target	Realisasi	% Capaian		
Misi : "Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah"							
Tujuan : "Meningkatnya Keselamatan Transportasi"							
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Hasil Penilaian AKIP Dinas	BB(76)	BB(79,02)	103,97	Sangat Baik	

		Perhubungan					
2	Meningkatnya Konektivitas dan Aksebilitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas	57	58	101,75	Sangat Baik	
Rata-rata Capaian Kinerja					-	-	

*Data : Hasil AKIP 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan capaian dari target sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2022 belum dapat ditentukan.

3.3 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022, berdasarkan hasil pengukuran di atas dapat disajikan melalui analisis capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatkan Tata Kolala Organisasi

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran I
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode
1.	Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan	BB(76)	BB(79,02)	100	Sangat Baik	

*Data : Hasil AKIP 2021

Dalam pencapaian indikator I dari sasaran strategis telah menampilkan hasil yang sangat baik, dengan capaian kinerja mencapai 103.97%. Dari Penilaian terhadap indikator Kinerja Sasaran I yang meliputi Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja yang dapat dinterprestasikan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Akuntabilitas Kinerja Sangat Baik.

Sasaran II : Meningkatnya Konektivitas dan Akseibilitas Antar Wilayah

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran II
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode
1.	Rasio Konektivitas	57	58	101,75	Sangat Baik	

Dalam pencapaian indikator II dari sasaran strategis telah menampilkan hasil yang sangat baik, dengan capaian kinerja mencapai 101,75%. Pada tahun 2021 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebanyak 2511 kasus, sementara pada tahun 2021 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebanyak 2570 kasus, ini berarti terjadi peningkatan angka pelanggaran sebanyak 59 kasus (meningkat sebesar 2,35%). Ini merupakan pencapaian yang sangat rendah, karena terjadi peningkatan angka pelanggaran yang sangat tinggi dari penurunan 5% yang diharapkan (2386 kasus), hal ini disebabkan karena sasaran yang sudah ditetapkan tidak didukung oleh kegiatan untuk pencapaiannya.

3.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.

Berikut ini dapat dilihat gambaran perbandingan penilaian tingkat pencapaian target kinerja dari masing-masing kelompok indikator kinerja per sasaran dengan tahun sebelumnya :

- a. Capaian Kinerja Sasaran I

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	BB(74)	BB(76)	100%	BB(76)	*BB (76)	-

*Data : Hasil AKIP 2021

Permasalahan yang dihadapi didalam mewujudkan capaian kinerja Sasaran I yang mana meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan terdapatnya kendala - kendala dalam mewujudkan sasaran antara lain :

- a. Masih kurangnya perencanaan disebabkan karena keterbatasan kompetensi personil.
- b. Penyusunan anggaran belum sepenuhnya mengacu kepada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama.
- c. Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penyusunan anggaran pada setiap tahapan.

b. Capaian Kinerja Sasaran II

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	%	Menurun 5%	Menurun 33,73%	674,60%	Menurun 5%	Meningkat 2,35%	-7,7%			
2.	Mengkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Antar Wilayah								57	58	101,75

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2022 capaian kinerja sasaran II yang mana pada awal tahun 2022 terdapatnya asistensi atas perubahan Indikator Kinerja yang disesuaikan dengan cascading dan diwujudkan dalam perjanjian kinerja. Sedangkan untuk tahun 2021 dari target yang ditetapkan menurunkan 5% persen, akan tetapi angka pelanggaran meningkat sampai dengan 2,35%. Ini merupakan suatu pencapaian yang sangat rendah. Dengan persentase capaian sebesar -7,7%. Sehingga tidak ada perbandingan capaian kinerja antara tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

3.3.2 Faktor-faktor yang menjadi masalah/ kendala dalam pencapaian target indikator kinerja.

Adapun permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran pengguna jalan dan perilaku masyarakat pengguna jalan yang masih sering mengabaikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain seperti mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk, sambil menggunakan HP dan ugal-ugalan dijalan.

2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat pengguna jalan akan pentingnya tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu.
3. Dukungan ketersediaan anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk penyelenggaraan operasional yang lebih baik.
4. Masih minimnya fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, Zoss, pagar pengaman jalan dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU) yang terpasang.
5. Kondisi kendaraan yang kurang memenuhi syarat laik jalan karena kurangnya perawatan.
6. Belum disiplinnya para pemilik dan pengguna kendaraan saat memarkirkan kendaraan di badan dan bahu jalan serta sering melanggar larangan.
7. Belum disiplinnya para pedagang dalam menjajakan dagangan mereka hingga ke badan jalan terutama di pasar pasar tingkat Kecamatan.
8. Kondisi jalan yang rusak juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan.

Strategi/upaya ke depan yang dapat ditempuh dalam meningkatkan capaian indikator ini ditahun berikutnya antara lain :

1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas.
2. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tertib lalu lintas kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain :
 - Penyuluhan langsung.
 - Pemasangan spanduk keselamatan berlalu lintas, poster, stiker.
 - Menginformasikan melalui website.
3. Melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan bekerja sama dengan Polres Pesisir Selatan.

4. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL, Zoss, guardrail) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU).
5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berikut ini dapat dilihat beberapa dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya pencapaian target kinerja:

- Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor



- Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan



- Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut



- Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan



- Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum



- Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja



3.4 Akuntabilitas Keuangan

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan, memerlukan anggaran dalam pelaksanaan operasionalnya. Belanja tidak langsung yang ada berupa belanja pegawai, Tunjangan, Iuran Asuransi, Tambahan Penghasilan PNS dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja serta Insentif Pemungutan retribusi. Sedangkan untuk belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mendapat belanja langsung sejumlah Rp.15.909.146.641,-. Belanja tahun 2022 ini pada perjalanan penggunaannya terjadi perubahan untuk penyesuaian dan penyelesaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Uraian Belanja Langsung
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Belanja Langsung	13.744.616.393,-	15.909.146.641,-
	Belanja Operasional	11.777.492.579,-	13.577.299.074,-
	Belanja Modal	1.967.123.814,-	2.123.754.294,-

Belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Adapun rencana anggaran untuk masing-masing sasaran akan terlihat sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Rencana Anggaran Masing-masing Sasaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran
Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Meningkatnya Konektivitas dan Aksebilitas Antar Wilayah	Rasio Konektifitas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.817.503.067,-
			Program Pengelolaan Pelayaran	66.964.850,-
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.024.678.724,-

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Untuk Masing-Masing Sasaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Konektivitas dan Akseibilitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas	57	58	101,75	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.817.503.067	9.491.303.446	96,68
					Program Pengelolaan Pelayaran	66.964.850,-	66.544.750	99,37
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan	BB (76)	BB (79,02)	103,97	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.024.678.724	5.894.412.853	97,84
TOTAL						15.909.146.641	15.452.261.049	97,13

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tercapainya 2 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 15.909.146.641,- (Lima belas milyar Sembilan ratus Sembilan juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 15.452.261.049,- (Lima belas milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu empat puluh Sembilan rupiah), dengan persentase realisasi sebesar 97,13%.

1.1 Kesimpulan

2. Berdasarkan visi, misi dan tujuan organisasi serta memperhatikan renstra 2021-2026 dan renja 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang akan diukur realisasi pencapaiannya.
3. Hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan BB (78)
 - b. Rasio Konektivitas 58
4. Pencapaian sasaran strategis tahun 2022 didukung oleh program-program dengan total dana kegiatan Rp. 15.909.146.641,- dan realisasi sebesar Rp. 15.452.261.049 atau 97,13 %.
5. Kendala-kendala dalam mewujudkan sasaran sesuai dengan target antara lain:
 - a. Sarana dan prasarana lalu lintas yang belum memadai
 - b. Masih kurangnya perencanaan disebabkan karena keterbatasan kompetensi personil.
 - c. Penyusunan anggaran belum sepenuhnya mengacu kepada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama.
 - d. Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penyusunan anggaran pada setiap tahapan.
 - e. Kurangnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan masih banyaknya pelanggaran terhadap rambu-rambu dan aturan yang ada.

1.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang adalah:

- a. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana pada satuan kerja dan

mengoptimalkan prasarana yang telah ada dengan melakukan perawatan yang intensif agar prasarana lalu lintas dapat berfungsi dengan baik, melakukan pengawasan dan pengendalian prasarana lalu lintas di setiap jam sibuk, melakukan kajian kebutuhan prasarana lalu lintas untuk perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas dan melakukan perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan teknis sesuai kebutuhan, memberdayakan pegawai dengan kemampuan teknis untuk memberikan pembekalan kepada petugas operasional/lapangan mengenai ketugasan di bidang perhubungan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- c. Penyusunan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama.
- d. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
- e. Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap masyarakat akan pentingnya disiplin dalam berlalu lintas.

Painan, 24 Februari 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SYAFRIJONI, SH.M.Si
NIP. 19700204 199101 1 002